

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN INDONESIA DAN HONGARIA**

Pada bab ini, penulis akan membagi pembahasan menjadi dua sub-bab. Pada sub-bab pertama, penulis akan membahas sedikit mengenai perekonomian Indonesia pada masa orde lama dan orde baru termasuk pembahasan tentang PJP Tahap I dan II. Lalu pada sub-bab kedua, penulis mencoba untuk menjelaskan bagaimana perekonomian Hongaria sebelum tahun 1990, dimana terjadi berbagai macam masalah ekonomi dan bagaimana pelaksanaan transformasi ekonomi di Hongaria. Pembahasan ini tentu saja akan menambah wawasan kita tentang salah satu negara di bagian Eropa Tengah ini yang jarang diperhatikan publik pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar penjelasan mengenai subjek dan objek dalam penelitian skripsi ini bisa tergambar dengan jelas.

#### **A. Sejarah dan Perkembangan Perekonomian Indonesia**

Kita ketahui bahwa masa pemerintahan orde lama merupakan masa dimana ekonomi Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi atau yang disebut *Hiper Inflation* yang mencapai 500 - 650%. Hal ini dilihat pada tahun-tahun pertama setelah merdeka, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk bahkan ekonomi nasional boleh dikatakan mengalami stagnasi. Defisit saldo neraca pembayaran dan defisit keuangan pemerintah sangat besar, serta kegiatan produksi sektor pertanian dan sektor industri manufaktur harus terhenti. Inflasi tersebut terjadi dikarenakan berbagai macam faktor

yaitu adanya pendudukan oleh Jepang, munculnya perang dunia ke-II, munculnya perang revolusi dan pelaksanaan manajemen ekonomi makro Indonesia yang sangat buruk.

Dari sejarahnya dapat dikatakan bahwa sistem politik yang dijalankan di Indonesia ternyata menyebabkan kehancuran politik dan perekonomian nasional di negara ini. Pada tahun 1950-an struktur ekonomi Indonesia masih berupa peninggalan zaman kolonialisasi. Dimana sektor formal, seperti pertambangan, distribusi, transportasi, bank, dan pertanian komersil adalah sektor yang memiliki kontribusi yang lebih besar dari pada sektor informal terhadap output nasional (PDB) yang didominasi oleh perusahaan-perusahaan asing dengan orientasi ekspor (Rumbia, 2009). Tentu saja adanya ketidakstabilan politik dan keamanan akibat adanya tekanan dari Belanda dan meningkatnya pemberontakan di berbagai daerah dapat sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia.

Selanjutnya, beranjak dari masa orde lama, Indonesia akhirnya memulai pemerintahan orde baru pada tahun 1966. Dimana pada tahun 1966 ini Indonesia mulai menjalin kembali hubungan dengan lembaga dunia seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF). Adanya pemulihan ekonomi dan politik dilakukan untuk menekan kembali tingkat inflasi dalam negeri, mengurangi defisit pada keuangan pemerintah dan mengembalikan kegiatan produksi termasuk ekspor.

Pada bulan Maret tahun 1966 merupakan saat dimana perekonomian Indonesia mengalami kondisi yang tidak menentu. Seperti ketidaksanggupan untuk memenuhi kewajiban utang luar negeri, adanya penerimaan ekspor yang hanya

setengah dari pengeluaran untuk import barang dan jasa, adanya ketidakberdayaan dalam mengendalikan anggaran belanja pemerintah dan pungutan pajak, adanya laju inflasi sebesar 30-50% perbulan, dan buruknya kondisi prasarana perekonomian serta masih banyak lagi.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang demikian, Indonesia kemudian menetapkan beberapa kebijakan yang di antaranya, yaitu memerangi hiperinflasi, mencukupkan stok bahan pangan, melakukan rehabilitasi terhadap sarana perekonomian, melakukan peningkatan dalam ekspor, menciptakan atau membuka lapangan pekerjaan, dan menarik kembali investor asing. Selain kebijakan yang sudah disebutkan sebelumnya, pemerintah juga mengeluarkan beberapa program pembangunan, salah satunya program jangka panjang. Program jangka panjang terdiri atas rangkaian Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang dimulai pada bulan April 1969. Adapun pembangunan jangka panjangnya terbagi atas dua tahapan pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan jangka panjang dimulai sejak 1 April 1969. Pelaksanaan pembangunan tersebut diatur berdasarkan urutan dalam mencapai ketiga sasaran pembangunan meskipun fokus utama pelaksanaan dapat berubah sesuai dengan masalah dan situasi yang sedang dihadapi saat itu. Adapun sasaran tersebut disebut dengan Trilogi Pembangunan, yang terdiri dari; stabilitas perekonomian, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Pada Pelita atau Pembangunan Lima Tahun I tahun 1969–1974, dijelaskan bahwa prioritas utamanya ada pada pemeliharaan stabilitas perekonomian yang kemudian disusul oleh sasaran

pencapaian pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Hal ini kemudian diubah pada Pelita II, dimana prioritas utamanya terkait dengan pertumbuhan yang kemudian diikuti dengan pemerataan lalu yang terakhir stabilitas. Selanjutnya pada Pelita III tahun 1979-1984, hingga pada Pelita VI tahun 1994-1999 urutan prioritas utamanya diubah menjadi pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas. Adapun kinerja perekonomian selama dua pelita sangat memuaskan dan pertumbuhan ekonominya rata-rata 7% per tahun. Selama masa PJP tahap I, Indonesia akhirnya berhasil dalam mengatasi berbagai masalah mendasar dalam pembangunan ekonominya. Salah satu masalah mendasar yang dapat terselesaikan adalah keberhasilan mengendalikan tingkat harga-harga umum (Rumbia, 2009).

Kemudian perlu kita ketahui bahwa Indonesia telah memasuki era pembangunan jangka panjang (PJP) tahap II sejak tahun 1994-2019. Tahapan pertama pembangunan jangka menengah adalah Repelita VI tahun 1994-1999. Namun pada akhir tahun 1997 terjadi krisis moneter yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia menurun meskipun Indonesia berada pada proses pembangunan ekonomi yang sangat memuaskan. Selama tahun 1993-1995, rata-rata pertumbuhan ekonomi pertahun berkisar antara 7,3% hingga 8,2% yang menyebabkan Indonesia termasuk negara di ASEAN dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Akan tetapi akibat krisis moneter tersebut menyebabkan pendapatan perkapita mengalami penurunan yang drastis dari angka 800 menjadi USD 640 di tahun 1998 dan USD 580 di tahun 1999.

Krisis moneter yang melanda membuat Indonesia harus menerima kenyataan bahwa pada akhirnya usaha yang dilakukan tidak berarti apa-apa. Hal ini dikarenakan sektor keuangan dan perbankan yang telah berhasil dikembangkan pada masa orde baru menjadi hancur akibat krisis tersebut. Sektor industri manufaktur dan sektor konstruksi juga mengalami penurunan produksi yang signifikan.

### **1. Pertumbuhan Ekonomi**

Tambahan dalam bukunya *Perekonomian Indonesia (2001)* menjelaskan bahwa pada tahun 1995 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8,2%, hal ini kemudian membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di ASEAN. Namun, pertumbuhan ekonomi tadi harus kembali menurun pada tahun 1998 sebesar 3,29%. Tidak hanya Indonesia, beberapa negara di Asia juga mengalami penurunan pada tingkat pertumbuhan ekonomi, seperti Thailand dengan tingkat penurunan hingga mencapai -10,2% dan Malaysia dengan tingkat penurunan -7,5%. Lalu pada tahun 1999, kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai membaik yaitu kurang lebih di atas 0%. Hal ini dilihat berdasarkan PDB pada tahun 1998 yang mencapai USD 141,0 miliar dibandingkan tahun 1995 yang hanya sebesar USD 94,2 miliar.

Adapun pada awal masa reformasi, tindakan-tindakan yang langsung diambil untuk mengatasi permasalahan ekonomi di Indonesia belum terlihat. Karena pada saat itu pemerintah masih berfokus pada pengendalian stabilitas politik. Hingga pada masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri langkah-langkah yang diambil untuk

mengatasi permasalahan tadi diambil berdasarkan dua kebijakan, yaitu penundaan pembayaran utang dan privatisasi BUMN.

Kemudian pada masa pemerintahan SBY, dengan berbagai permasalahan terkait harga minyak dunia. SBY akhirnya mengeluarkan kebijakan mengurangi subsidi BBM dengan menaikkan harga BBM. Tidak hanya itu, SBY juga mengeluarkan kebijakan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi rakyat miskin. Hal ini tentu saja tidak berlangsung mulus bahkan mengalami berbagai kendala. Namun, pemerintah tetap berupaya untuk mengatasi permasalahan ekonomi dengan melaksanakan pembangunan infrastruktur dan menarik kembali investasi asing sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat tumbuh dengan cepat.

Pertumbuhan ekonomi yang cepat ini juga didukung dengan semakin meratanya sumber pertumbuhan ekonomi dimana sektor investasi memiliki peran yang sangat penting. Dengan adanya keberhasilan untuk menciptakan stabilitas ekonomi makro (nilai tukar dan inflasi) tadi, pendapatan per kapita Indonesia apabila diukur dengan Dollar Amerika, maka mengalami peningkatan sebesar 1,8 kali pada akhir tahun 2008 dibandingkan akhir tahun 2004, dan melebihi USD 2.000 per kapita pada akhir tahun 2008 (Rumbia, 2009).

## **B. Sejarah Perekonomian Hongaria**

Perlu kita ketahui bahwa nama resmi negara Hongaria pada tahun 1949 hingga tahun 1989 atau selama periode komunis adalah *The Peoples State of Hungarian Republic*. Adapun *landlock country* merupakan sebutan bagi Hongaria sebagai negara dengan luas wilayah sebesar 93.030 m<sup>2</sup>. Wilayah Hongaria sendiri berbatasan langsung dengan Slovakia dan Ukraina yang berada tepat di sebelah utara, Rumania di sebelah timur, adapun Serbia dan Kroasia di sebelah selatan dan di Slovenia di sebelah barat ((ITPC), 2010). Pada tahun 1949, Hongaria dipimpin oleh Mátyás Rákosi yaitu seorang politikus komunis Yahudi di Hongaria. Pada saat itu, Rákosi berusaha untuk memaksakan kekuasaan otoriternya yang dapat kita lihat pada penerapan sistem pendidikannya yang berkembang dengan cepat di Hongaria (Éva Erlich, 1995).

Di pedesaan, Rákosi berusaha memberlakukan kolektifisasi secara paksa. Pemerintahannya jelas sangat tidak disukai. Ketika Stalin, perdana menteri Uni Soviet tahun 1924 meninggal dunia pada tahun 1953, Mátyás Rákosi digantikan sebagai perdana menteri oleh Imre Nagy. Namun, Rákosi mempertahankan posisinya sebagai sekretaris jenderal Partai Buruh Hongaria selama tiga tahun berturut-turut dan berakhir dengan pemenjaraan Imre Nagy setelah tahun 1956 dan dieksekusi pada tahun 1958 saat Revolusi Hongaria.

Setelah revolusi, orang kepercayaan Soviet, János Kádár menjadi pemimpin baru dengan membentuk Partai Sosialis Pekerja Hongaria. Kádár juga memimpin teror liar terhadap revolusioner. Namun pada awal 1960-an, Kádár mengumumkan

kebijakan baru di bawah moto "Dia yang tidak melawan kami adalah teman kami". Selanjutnya pada tahun 1966, Komite Sentral menyetujui "Mekanisme Ekonomi Baru," yang mana melalui mekanisme tersebut Komite Sentral berusaha untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan produktivitas, membuat Hongaria lebih kompetitif di pasar dunia, dan menciptakan kemakmuran untuk memastikan stabilitas politik.

Selama dua dekade berikutnya peningkatan dalam negeri relatif rendah, pemerintahan Kádár menanggapi tekanan yang memaksa untuk melakukan reformasi politik dan ekonomi secara berurutan. Pada awal tahun 1980-an, pemerintahan Kádár berhasil meraih beberapa reformasi ekonomi dan liberalisasi politik yang terbatas dan menerapkan kebijakan luar negeri yang dapat mendorong perdagangan yang lebih dengan Barat. Namun demikian, "Mekanisme Ekonomi Baru" menyebabkan meningkatnya utang luar negeri, dan pengeluaran lebih untuk menopang industri yang tidak menguntungkan. Adapun Masa transisi Hongaria ke negara demokrasi bergaya barat merupakan salah satu "*smooth act*" di antara negara-negara bekas blok Soviet lainnya.

Lalu pada tahun 1988, Kádár diangkat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis oleh pemimpin reformasi komunis, Imre Pozsgay. Lalu pada tahun 1989, Parlemen mengadopsi "paket demokrasi" yang termasuk serikat pekerja pluralisme; kebebasan berserikat, berkumpul, dan pers; undang-undang pemilu baru; dan sebagainya. Sejak itu, Hongaria telah berusaha untuk mereformasi ekonomi dan meningkatkan hubungannya dengan Eropa Barat.

Dalam buku *Hungary and Its Prospects* (1995) juga menjelaskan bahwa dalam sesi bersejarah pada tanggal 16-20 Oktober 1989, Parlemen mengadopsi undang-undang penyediaan kebutuhan untuk pemilihan parlemen multipartai dan pemilihan presiden langsung. Undang-undang Hongaria berubah dari Republik Rakyat menjadi Republik Hongaria, menjamin hak asasi manusia dan sipil, dan menciptakan struktur kelembagaan yang menjamin pemisahan kekuasaan antara yudikatif, eksekutif, dan legislatif.

Salah satu karakteristik utama dari ekonomi komunis adalah likuidasi radikal milik pribadi dan kolektivisasi faktor produksi. Organisasi ekonomi menjadi bagian dari kontrol birokrasi negara. Karakteristik penting lain dari ekonomi komunis adalah kediktatoran. Karena manusia juga merupakan bagian dari produksi, maka mereka harus berada di bawah kekuasaan pusat. Yang mana dapat dikatakan bahwa negara-negara Eropa Timur dan Tengah mengikuti kebijakan ekonomi yang sama yang diatur oleh Moscow (Éva Erlich, 1995, pp. 14-17).

Kebijakan tersebut di antaranya: memaksa pertumbuhan ekonomi, termasuk tujuan kuantitatif, berkonsentrasi pada industri berat, memperluas sumber daya yang digunakan, termasuk mempertahankan pekerjaan penuh, dan menghilangkan pengaruh pasar.

## **1. Situasi Ekonomi di Hongaria**

Pembangunan politik memiliki dampak langsung terhadap pengembangan ekonomi Hongaria. Sistem perencanaan terpusat telah didirikan di Hongaria setelah Perang Dunia Kedua. Tentu saja terdapat perbedaan dengan sistem perencanaan terpusat di kawasan lain namun pada dasarnya maksud dari sistem ini adalah sama. Sistem Hongaria umumnya tidak sekuat di Cekoslovakia tetapi perbedaan yang lebih besar mulai nampak saat kedua negara ini memperkenalkan reformasi dari masing-masing negara setelah tahun 1968 (Židek, 2014).

Inti dari reformasi yang disebut sebagai Mekanisme Ekonomi Baru, terdiri dalam desentralisasi proses pengambilan keputusan dalam perekonomian yang bergeser dari pusat ke perusahaan. Namun, keputusan utama (misalnya tentang investasi atau industri persenjataan) masih dilakukan oleh pemerintah. Di sisi lain, perusahaan yang relatif independen berbeda dengan rekan mereka yang ada di Cekoslovakia.

Hongaria kemudian menjadi negara pertama di Eropa Tengah yang telah memasukkan nilai tambah pajak ke dalam sistem pajaknya pada tahun 1988. Selanjutnya, terdapat 63% dari total semua harga yang telah diliberalisasi pada tahun 1989 (EBRD, 2007). Adapun devaluasi mata uang Forint yang terus menerus dari USD \$45,8 pada tahun 1986 ke USD \$63,2 pada tahun 1990 (Vintrova, 1992).

Peran pemerintah dalam bentuk redistribusi menjadi yang tertinggi di Hongaria selama periode komunis atau bahkan menjadi salah satu yang tertinggi di antara perencanaan ekonomi-ekonomi pusat lainnya. Lihat tabel berikut.

**Tabel 2.1 Pendapatan dan Pengeluaran Dalam % dari PDB Tahun 1989**

Negara	Pendapatan	Pengeluaran
Czechoslovakia	62.1	64.5
Hongaria	61.3	63.7
Polandia	46.8	48.7
Bulgaria	57.7	60.1
Uni Soviet	43.8	50.7
Amerika	34.3	36.5
Jerman	45.7	45.9
Kanada	40.3	43.9
Perancis	46.2	47.8

*Sumber: Jonáš, Ekonomická transformace v České republice, (1997)*

Pada tabel di atas, dapat kita lihat posisi Hongaria sebagai negara dengan pendapatan dan pengeluaran tertinggi kedua setelah Cekoslovakia, dimana pendapatan Hongaria sebesar 61.3% dan pengeluarannya sebesar 63.7%. Lalu, diikuti oleh Bulgaria dengan pendapatan 57.7% dan pengeluaran 60.1%. Posisi Amerika sendiri berada pada posisi terendah dengan pendapatan 34.3% dan pengeluaran 36.5% di tahun 1989.

**Tabel 2.2 Struktur Ketenagakerjaan Pada Tahun 1990**

	Cekoslovakia	Hongaria	Polandia
Pertanian	11.8	17.5	26.7
Industri	45.4	36.1	36.6
Jasa	42.8	46.4	36.7

*Source: Berend, From the Soviet Bloc to the European Union, (2009)*

Tabel di atas merupakan data perbandingan struktur ketenagakerjaan Hongaria dibanding Cekoslovakia dan Polandia. Adapun persentase pekerja Hongaria di bidang pertanian yang relatif tinggi. Di sisi lain, Hongaria memiliki pangsa pasar industri yang relatif rendah, yang diasumsikan menjadi bagian paling bermasalah dari

proses transformasi ekonomi. Pada saat yang sama, Hongaria memiliki proporsi tertinggi yang berkaitan dengan sektor jasa di Eropa Tengah.

Permasalahan secara keseluruhan di Hongaria mirip dengan yang dialami negara-negara lain di Blok Timur setelah Perang Dunia kedua, namun pertumbuhan itu dipengaruhi oleh fluktuasi yang lebih signifikan daripada di Ceko-slovakia. Ekonomi Hongaria mampu mencapai pertumbuhan yang kuat selama tahun 1950 namun pada dekade berikutnya pertumbuhannya menjadi sangat rendah selama tahun 1980.

Dapat dikatakan bahwa persiapan Hongaria dalam transformasi di tingkat lembaga formal dan tingkat ekonomi mikro relatif baik. Namun, Hongaria menghadapi masalah di tingkat ekonomi makro dimana keterbukaan masyarakat mengakibatkan proporsi ekonomi yang relatif lebih tinggi dengan pengetahuan tentang fungsi ekonomi pasar.

## **2. Dasar Transformasi Ekonomi**

Pemerintahan pasca-komunis pertama dibentuk oleh Jozsef Antall (1932-1993). Pemerintahannya merupakan pusat-langsung dan berbasis partai nasional dan Kristiani. Pemerintahan Antall memiliki suara mayoritas terkuat dari 60% di parlemen, yang mana memberi pemerintah posisi yang stabil. Salah satu pencapaiannya yaitu saat pasukan Soviet meninggalkan Hongaria pada pertengahan tahun 1991. Dan pada tahun yang sama, perjanjian asosiasi dengan masyarakat Eropa ditandatangani juga.

Di Hongaria, Partai Komunis berubah menjadi Partai Sosialis Hongaria, yaitu partai sayap kiri (sosial demokrat) setelah tahun 1989. Sedangkan, sebuah pemerintahan koalisi sayap kanan (yang dipimpin oleh Fidesz membentuk partai utama) yang dibentuk setelah pemilu pada tahun 1998. Hongaria bergabung dengan NATO selama rezimnya. Fidesz juga memenangkan pemilu berikutnya pada tahun 2002 akan tetapi ia tidak mampu “merakit” sebuah pemerintahan yang dibentuk oleh partai-partai sayap kiri (Židek, 2014).

Berdasarkan penjelasan di atas, urutan reformasi di Hongaria berada pada pembahasan yang sama seperti di negara-negara lain pada awal periode transformasi. Dimana Hongaria meyakini kenyataan bahwa partai komunis lah yang telah memulai reformasi sebelum jatuhnya rezim Fidesz. Oleh karena itu, rakyat Hongaria percaya bahwa reformasi radikal merupakan hal yang tidak perlu (atau secara de facto tidak mungkin) untuk diikuti.

Di sisi lain, para pendukung tidak mempercayai kemampuan pemerintah dalam membangun ekonomi pasar. Akibatnya, pada periode pertama transformasi di Hongaria sering digambarkan secara gradualis (bertahap). Beberapa langkah yang diambil Hongaria terutama atas *bankruptcy law* dapat dikatakan sebagai tindakan radikal ekstrim. Pada periode kedua berkaitan dengan reformasi yang berlangsung di tengah tahun 1990-an, dan yang ketiga fokus kepada periode setelah pergantian abad.

Kita tahu bahwa perekonomian Hongaria mengalami ketidakseimbangan dalam ekonomi makro. Laki (1993) menuliskan bahwa pemerintahan Antall memiliki tiga tugas utama: *Pertama* untuk menjaga kredit negara, *kedua* untuk mengurangi

inflasi dan defisit publik yang berkembang dan *ketiga* adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan keuangan publik yang semakin memburuk. Jatuhnya rezim tersebut menyebabkan pendapatan negara menurun, akan tetapi kabinet tidak mampu secara bersamaan menurunkan pengeluarannya (Allen & Haas, 2001).

Pemerintah Hongaria tidak akan menerapkan langkah-langkah yang tidak efektif seperti penurunan upah riil atau devaluasi (berkebalikan dengan Cekoslovakia dan Polandia) sama sekali. Holman (2000) menuliskan bahwa upah riil di semua negara mengalami penurunan sebesar 20%. Namun, Hongaria tidak termasuk negara yang mengalami penurunan upah riil. Hal tersebut berarti bahwa pada saat yang sama biaya upah tetap relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negara Eropa Tengah lainnya yang kemudian menyebabkan ketidakseimbangan.

Walaupun demikian, pemerintah Hongaria tetap menerapkan reformasi di sektor bisnis dan keuangan pada saat yang sama. Langkah tersebut diambil untuk memperbaiki sistem hukum, untuk memprivatisasi, untuk memperbaiki kebijakan anti monopoli, dan yang paling utama untuk mengatasi kebangkrutan. Hasil data ekonomi di Hongaria pada periode ini cenderung negatif. Hongaria pada akhirnya akan mengalami penurunan yang sama (atau lebih) seperti negara-negara lain di Eropa Tengah.

Pengembangan inflasi tidak melebihi liberalisasi harga (yang berlangsung di negara-negara lain) tapi selalu ada inflasi yang terus meningkat. Dilihat dari sisi positif, peningkatan yang relatif tinggi pada modal asing mengalir ke keuangan

Hongaria. Hal tersebut berakar dari liberalisasi sebelumnya karena adanya investor asing yang dapat dikatakan “akrab” dengan situasi di Hongaria. Pada saat yang sama, muncul defisit dari transaksi berjalan (Židek, 2014).

Pada tahun 1994, ekonomi Hongaria menghadapi situasi yang sulit, seperti yang dapat kita lihat pada tabel berikut. Defisit pemerintah mencapai 8,4% dari PDB, utang publik adalah 88% dari PDB, defisit transaksi berjalan mencapai 9,5% dari PDB, inflasi 18,8% dan tingkat pengangguran hampir 11%. Tingkat ketidakseimbangan berada pada titik yang sangat kritis. Holman (2000) menulis bahwa IMF menempatkan Hongaria dalam posisi tiga negara dengan perekonomian yang paling rentan di dunia setelah krisis Meksiko. Akibatnya, penyebaran utang eksternal untuk tingkat Libor mencapai 500 poin basis (Stojanov, 2004).

Pemilihan umum berlangsung pada tahun 1995. Sosial demokrat yang memenangkan pemilihan itu sepakat untuk menerapkan program yang disebut *package Bokros*. Serangkaian reformasi telah dikembangkan melalui kerjasama dengan IMF. Pemerintah berjanji untuk mengikuti langkah-langkah menuju ke arah penghematan dan IMF dalam pertukaran yang disediakan negara dengan pinjaman sebesar USD 300 juta dan termasuk dana yang dikeluarkan oleh EBRD juga (Hanley, King, & Janos, 2002).

*Package Bokros* juga meliputi obat-obatan lain. Nilai tukar mengalami devaluasi hingga 9% dan akhirnya mengalami *crawling peg*<sup>1</sup>. Pada saat yang sama,

---

<sup>1</sup> *The crawling peg system* didasarkan pada devaluasi kecil dari mata uang secara berkala (biasanya bulanan). Pertama-tama, bank sentral memutuskan devaluasi sebesar 1,9% per bulan saat musim semi tahun 1995. Tingkat

pemerintah memperkenalkan biaya tambahan impor sementara sebanyak - 8% pada semua (non-investasi) barang<sup>2</sup>, dan juga menerapkan pembatasan usaha. Hal ini guna mengurangi jumlah lapangan kerja di perusahaan negara; iuran universitas mulai diberlakukan; aturan bagi tunjangan sakit diperketat dan tunjangan anak dihilangkan.

Perjanjian tentang pengurangan upah riil sebagian besar diraih oleh serikat pekerja. Pemerintah juga memutuskan untuk segera memprivatisasi hampir semua perusahaan negara, bar, kereta api, dan pos yang sebagian besar dalam bentuk investasi asing langsung, seperti yang dapat kita lihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.3 Arus Masuk FDI di Hongaria Dalam USD Juta (1972-2000)**

	In cash	Of which privatization income	as %	Investment in kind	Total
1972-1989	387	-		783	1170
1991	311	20	6.4	589	900
1992	1459	435	29.8	155	1614
1993	1471	492	33.4	170	1641
1994	2,339	1,163	49.7	142	2,481
1995	4,453	3,370	75.7	185	4,638
1996	1,983	618	31.2	57	2,040
1997	2,085	1,827	87.6	22	2,107
1998	1,935	485	25.1	11	1,946
1999	1,651	295	17.9	6	1,657
2000	1,600	0	0.0	0*	1,600
1990-2000	20,434	8,808	43.1	1510	21,876

\*- in the fiscal year 2000, this figure was equal to USD 280.00 – which is 0 while rounded to Millions

Source: Csáki, *From Transition to Integration*, (2002), own calculations

Dapat dikatakan bahwa perubahan di sektor perbankan juga terhubung dengan *Bokros package*. Hingga pertengahan tahun 1990, lembaga asing dilarang melakukan penyimpanan di bank Hongaria lebih dari 25% tanpa izin khusus. Aturan ini

devaluasi menurun di tahun-tahun berikutnya menjadi 0,6% per bulan sejak tanggal 1 Januari 1999, lalu 0,3% pada tanggal 1 Januari 2000, dan akhirnya 0,2% pada tanggal 1 April 2001 (Magyar Nemzeti Bank, 1990-2003).

<sup>2</sup> Berlaku biaya tambahan impor yang akibatnya secara bertahap dihapus sesuai dengan rencana (Tomšik, 1998).

kemudian tidak digunakan lagi setelah tahun 1995 dan semua bank besar di Hongaria berakhir dengan privatisasi di tangan lembaga keuangan Eropa pada tahun 1997 (Hanley, King, & Janos, 2002).

Lalu pada tahun 1990 Dana Properti Negara (SPA) dibentuk, SPA berfungsi sebagai lembaga pusat yang bertanggung jawab untuk privatisasi. Pada tahun ini, SPA mengendalikan 1.975 perusahaan negara (1.700 di sektor industri dan sisanya di sektor pertanian). Menurut Earle dan Estrin (1996) hal tersebut mungkin dapat mencegah penyalahgunaan yang lebih buruk karena SPA sendiri memiliki hak untuk menyetujui semua penjualan.

### **3. Pertumbuhan Ekonomi**

Dapat kita lihat bahwa terdapat kesamaan dengan negara-negara lain di Eropa tengah, Hongaria juga menderita saat resesi transformasi. Reformasi (gradualisme) yang lebih lambat tidak membantu dalam menghindari resesi tersebut, sama halnya dengan yang terjadi tahun 1995. Tetapi pada dasarnya hal ini merupakan sesuatu yang wajar. Ekonomi Hongaria mampu mencapai pertumbuhan sekitar 3 atau 4 persen setelah mengatasi resesi transformasi. Sementara itu, indikator PDB per orang menurun pada awal proses transformasi terlepas dari laju reformasi. Pada tahun 1995, mencapai tingkat pra-resesi dan terus meningkat di tahun-tahun berikutnya. Hal ini hampir dua kali lipat dibandingkan dengan tahun 1989 pada akhir tahun 2004.

Beranjak dari penjelasan diatas kita lihat bahwa struktur ekonomi yang berkaitan dengan perubahan penting atas peran pemerintah terjadi dalam

perekonomian suatu negara. Kita bisa melihat perkembangan mengejutkan di Hongaria, di mana peran pemerintah (pengeluaran terhadap PDB) pada kenyataannya meningkat (dari tingkat yang sudah tinggi) pada awal tahun 1990-an. Dan menurun hanya dengan penerapan *Bokros Package*. Selama tahun 1990-an, tren ini umumnya menurun di negara-negara Eropa Tengah. Hal ini berubah di era milenium baru ketika pangsa pemerintah meningkat di semua negara.

Selama dekade pertama transformasi, inflasi di Hongaria relatif rendah. Akan tetapi inflasi di Hongaria sudah relatif tinggi di tahun-tahun berikutnya. Hal ini sebagian disebabkan oleh monetisasi<sup>3</sup>. Penurunan inflasi dapat dilihat pada akhir tahun 1990-an. Bahkan harga konsumen naik lebih dari 5% per tahun. Perhitungan rata-rata untuk periode antara tahun 1990 dan 2003 mencapai hampir 18% (IMF, 2010).

Secara keseluruhan, ekonomi Hongaria sangat terintegrasi ke dalam ekonomi dunia. Pangsa ekspor dan impor dalam PDB meningkat dari 60% dalam paruh pertama tahun 1990-an ke lebih dari 160% sebelum krisis ekonomi terakhir. Adapun masalah-masalah yang di alami Hongaria pada pertengahan dekade tidak separah pada pertengahan tahun 1990-an tetapi memberikan kontribusi masalah mata uang selama krisis ekonomi dunia pada akhir dekade pertama.

Berdasarkan pembahasan di sub-bab ini dapat dikatakan bahwa adanya kemampuan ekonomi Hongaria untuk tumbuh lebih baik. Yang kemudian

---

<sup>3</sup> Monetisasi merupakan proses konversi sesuatu yang tidak bernilai menjadi sesuatu yang mempunyai nilai jual yang tinggi.

mengakibatkan ekonomi Hongaria bisa mulai menutup celah dari negara-negara maju. Sebagian besar indikator ekonomi lainnya juga dikembangkan secara positif. Selain itu, dijelaskan juga bahwa perusahaan di Hongaria berhasil bangkit dari tekanan kompetitif di Uni Eropa.

Di sisi lain, kita telah melihat bahwa pembangunan di Hongaria secara tidak langsung. Bahkan negara ini menderita transformasi resesi seperti negara-negara lain di Blok Timur meskipun dengan kondisi awal yang secara signifikan lebih baik dalam beberapa aspek. Reformasi ekonomi yang hanya dilakukan setengah hati pada tahun pertama transformasi menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi yang kemudian di atasi dengan langkah-langkah ekonomi yang sulit dalam bentuk *The Bokros Package*. Perkembangan ini bisa berfungsi sebagai model kasus untuk negara-negara (seperti Yunani hari ini) yang menunda reformasi yang sedikit menyulitkan. Sayangnya, ekonomi Hongaria tidak dapat menghindari masalah lainnya. Benar bahwa proses transformasi itu rumit dan sulit namun Hongaria mampu mencapai tujuan utama dari proses transformasi tersebut.